BUDAYA POLITIK DAN KONFLIK NILAI DALAM MASYARAKAT LOKAL

Oleh
Asrinaldi

Abstract

This article want to answer the question why conflict appears to the democratization process in Indonesia. Is it a historical necessary? and How internalization of local values relates to state values?

PENGANTAR

Mungkin kita perlu menjawab pertanyaan mengapa sering muncul konflik dalam masyarakat yang menyertai proses demokratisasi di Indonesia? Apakah konflik politik tersebut keharusan sejarah kita dalam berbangsa dan bernegara yang harus dilalui? Lalu, bagaimana proses internalisasi nilai-nilai lokal dalam melangsungkan demokratisasi tersebut hingga berakibat pada benturan nilai yang berakhir dengan konflik? Dalam kenyataannya bahwa kerusuhan antar suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia tidak makin menyurut, tetapi justru sebaliknya meningkat. Konflik antar Suku Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah, atau konflik bernuansa agama di Poso, Sulawesi Tengah, konflik "kepentingan eliet politik" di ambon yang di bungkus dengan sentimen keagamaan. Lalu di Aceh, konflik masyarakat lokal dengan negara yang bermuara pada gerakan kemerdekaan masyarakat lokal. Mungkin banyak lagi konflik yang akan muncul di negara ini. Karena memang dalam kondisi bangsa yang plural seperti Indonesia menyimpan bahaya konflik yang terpendam dan siap membara jika disulut.

Sulit memungkiri kenyataan bahwa berbagai konflik dan kerusuhan sosial kini menjadi semacam kecenderungan baru di dalam masyarakat kita. Apa yang

ditulis Samuel P. Huntington (1993) *The Clash of Civilizations* bahwa perang masa depan tidak lagi perang antara negara-negara nasional atau perang antara kekuatan-kekuatan modal, tetapi perang antar kultur, dan antar peradaban, nampaknya sedang berlangsung di negara ini. Patut disayangkan bahwa benturan peradaban ini tidak hanya terjadi antar negara, tapi antar individu warga negara. Dan Bangsa Indonesia menghadapi kondisi ini. Gejala pada benturan nilai peradaban ini dapat dilihat, pertama, adanya ketidakpuasan masyarakat di tingkat lokal terhadap gaya kepemimpinan pemerintah pusat. Kekecewaan dan ketidakpuasan itu terakumulasi secara gradual yang membawa implikasi politik secara luas dalam masyarakat. Fenomena ini disertai dengan mengedepannya isu lokal, dimana *political consciusness* individu muncul untuk mempertimbangkan kembali keuntungan yang mereka peroleh bergabung dengan Republik Indonesia, negara bangsa modern yang berdaulat (*sovereign modern nation state*). Kedua, kesadaran politik ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi informasi yang melewati batas-batas geopolitik suatu negara. Ini berdampak pada semakin memudarnya semangat nasionalisme. Merujuk pada apa yang dikonsepsikan oleh Ernest Rehan, secara sederhana nasionalisme diartikan sebagai kehendak suatu kelompok manusia untuk bersatu. Persoalannya kini adalah muncul juga keinginan mendalam suatu kelompok masyarakat untuk bersatu dalam ikatan etnis tertentu dengan mengedepankan semangat etnonasionalisme.[1] Dan diyakini bahwa gejala ini akan berlangsung terus selama pluralisme dianggap sebagai sebuah keniscayaan sejarah manusia.

Ketiga, fakta politik yang dapat dilihat adalah telah hilangnya orientasi nilai dalam kehidupan masyarakat (*values disoriented*). Bahkan ironinya, gejala tersebut diiringi dengan memudarnya rasa amanah sosial (*social trust*) di dalam prilaku sosial, prilaku ekonomi dan bankan prilaku politik mereka.[2] Masyarakat tidak lagi mempercayai suatu kelompok individu yang tidak memiliki keterikatan nilai sejarah dengan nilai yang mereka amalkan.

[1] Munculnya gerakan politik bersenjata di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua adalah bukti menguatnya akar etnisitas dalam politik.

[2] Alhilal Hamdi, "Ekonomi Politik Transisi Ke Demokrasi Di Indonesia" dalam ***Jurnal Reformasi Ekonomi***, LSPEU-Indonesia, Vol.2. No.1. Januari 2001

Ini merupakan konsekensi format politis yang dibentuk oleh regime Orde baru. Sebagaimana yang dikemukakan Alhilal Hamdi, dia melihat bahwa politik penyeragaman yang diberlakukan pemerintah Orde Baru berakibat pada tidak seimbangnya (*skewed*) hubungan antara masyarakat dengan negara. Implikasinya, publik kehilangan sifat sportif di dalam perilaku sosial, ekonomi dan politik.[3] Gejala ini bukan berarti hilang dari dunia elite. Elite pun sebagai sebuah komunitas politik mengalami hal yang sama, mereka terbagi (*divide*) dan sulit untuk melakukan kompromi yang dinegosiasikan (*elite settlements*)

Sebuah laporan yang dipublikasikan Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia menyebutkan bahwa statistik konflik yang terjadi di Indonesia cenerung meningkat dalam dekade terakhir. Misalnya, tahun 1996 terdapat 43 insiden, 1998 naik lagi menjadi 245 insiden dan periode Januari - Juni 2000 menjadi 278 insiden (Republika, 25 Mei 2001). Ini sungguh mengkhawatirkan! Insiden yang terbesar justru terjadi pada masa reformasi. Wajar saja kita bertanya mengapa kecenderungan ini meningkat? Apakah sistem politik yang tidak lagi mampu mengikuti gelombang demokratisasi?

Melihat kondisi ini Huntington[4] juga mengkhawatirkan kerapuhan dan stabilitas dari suatu sistem politik yang demokratis. Ia mencoba memasukkan konsep stabilitas atau institusionalisasi ke dalam suatu definisi demokrasi. Penggunaan konsep ini mengarah pada hingga derajat manakah sistem politik itu dapat diharapkan tetap hidup dalam suatu masyarakat. Karena memang stabilitas merupakan suatu dimensi utama dalam analisis terhadap sistem politik manapun. Oleh karenanya, stabilitas suatu sistem berbeda dengan hakikat sistem itu sendiri.

Insiden dalam masyarakat, termasuk huru hara politik yang menyertai demokratisasi yang berlangsung sekarang ini, sangat berkaitan dengan terjadinya pergeseran nilai-nilai politik dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia pada mulanya memiliki perilaku politik *heterogeneous-passive cultures*. Namun, oleh sebuah kekuatan jangka pendek (*short term*

[3] *Ibid*

[4] Samuel P. Huntington, ***The Third Wave : Democratization In The Late Twentieth Century***, University of Oklahoma Press, 1991

forces) bergeser menjadi *heterogeneous-active cultures.*[5]

Menurut pandangan Woshinsky (1995), masyarakat yang berperilaku *heterogeneous-passive cultures* tidak akan menghabiskan waktunya untuk saling berdebat mengenai kebijakan pemerintah. Mereka juga tidak akan melakukan demonstrasi terhadap aksi negara yang tidak mereka senangi. Akan tetapi, kultur masyarakat seperti ini menyimpan ketegangan politik (*political tension*) yang dramatis. Pada dasarnya mereka berbeda secara radikal. Sepanjang perbedaan ini tidak ditegaskan, mereka biasa hidup harmonis. Tetapi, jika masyarakat mulai menjadi 'modern' dan bertindak untuk mengembangkan nilai-nilainya, konflik pun akan muncul dramatis sebab nilai-nilai tersebut secara diametrikal berlawanan dengan yang lain.

Asumsi ini memiliki kesamaan dengan yang diungkap James C. Davies (1962) yang terkenal dengan "*J-Curve Theory of Revolution*". Davies yang mengambil sebuah ide dari Tocqueville, berpendapat bahwa revolusi dan kegelisahan sosial (*social unrest*) tidaklah terjadi dalam masyarakat yang tertindas dan tidak berpengharapan atau sama sekali kehilangan sumber material. Revolusi terjadi setelah masyarakat mengalami kemajuan hidup yang progresif, akan tetapi tidak puas ketika perbaikan tidak berlanjut secara cepat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat yang bersamaan masyarakat menjadi modern (dalam berparti-sipasi) dan mulai mengekspresikan hasrat politiknya lebih cepat daripada kemampuan sistem mengakomodasinya.

MEMAHAMI BUDAYA POLITIK MASYARAKAT INDONESIA

Sesungguhnya kita harus memulainya dari konsep budaya politik itu sendiri. Konsep budaya politik muncul mewarnai khasanah perpolitikan masyarakat dunia setelah Perang Dunia II. Sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat bahwa pasca Perang Dunia II perkembangan wacana politik mengalami kemajuan yang berarti. Sesuatu yang signifikan terjadi ketika kalangan ilmuwan politik menemukan sebuah fenomena progresif dalam madzhab positivisme, yaitu sebuah paham

[5] Selanjutnya lihat Oliver H. Woshinsky, *Culture And Politics : An Introduction To Mass And Elite Political Behavior*, Prentice Hall, Inc., 1995 h 51-60

yang percaya bahwa ilmu sosial memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam, dalam ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu politik. Madzhab positivisme ini dikuatkan oleh berlangsungnya *behavioral revolution* atau ada juga yang dinamakan dengan *behavioralism*.[6]

Afan Gaffar mengemukakan perkembangan behavioralisme sebagai berikut, "adalah satu faktor penopang lahirnya revolusi behavioral ini adalah muncul dan berkembangnya kecenderungan baru dalam dunia penelitian, yaitu kecenderungan untuk mengadakan penelitian survey (*survey research*)"[7]

Kecenderungan seperti ini juga menambah pola pikir ilmuwan politik di Indonesia untuk menjelaskan fenomena politik dari aspek perilaku individu. Behavioralisme memandang bahwa dengan melihat individu sebagai unit analisis politik, maka gambaran tentang masalah politik akan dapat dijelaskan secara tepat, karena memang masalah kaum behavioral meyakini bahwa masalah politik memiliki keterkaitan dengan individu yang determinan dalam hadirnya masalah tersebut. Inilah yang diungkap secara tegas tentang adanya faktor dari dalam diri individu (*push factor*) dan faktor dari luar (*pull factor*).[8] Kedua faktor itulah pada akhirnya akan menentukan sikap individu (*attitudes*) yang lazim melahirkan perilaku politik (*political behavior*).

Bagi kalangan akademisi yang memang mendalami kajiannya tentang politik, tidaklah asing dengan teori budaya politik. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh David Easton yang selanjutnya dikembangkan oleh Gabriel A. Almond dan Sydney Verba.

Karya mereka yang monumental dan sangat berpengaruh dalam telaahan politik dari sudut pandangan ini adalah *The Civic Cultures: Political Attitude And Democracy In Five Nations* (1963). Karya mereka ini menjadi rujukan banyak ahli politik untuk melihat fenomena perilaku politik individu.

Secara konseptual budaya politik diartikan Gaffar (2000) sebagaimana diungkap Almond dan Verba, adalah suatu sikap individu terhadap sistem politik dan

[6] Periksa Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000 h. 97

[7] *Ibid*

[8] Dean Jaros and Lawrence V. Grant, *Political Behavior*, St. Martin's Press, 1974 h.245-71

komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik.[9] Menyangkut "peranan yang dapat dimainkan" oleh individu tentunya dipengaruhi oleh orientasi nilai yang dipunyai individu tersebut. Orientasi nilai terbentuk oleh sistem nilai yang pada akhirnya melahirkan sikap (*attitudes*). Inilah keterkaitan antara nilai dan sikap yang dimaksud tersebut.

Untuk memahami fenomena ini, banyak ahli menekankan studi perilaku ini pada sikap yang merupakan dasar psikologi perilaku. Pemahaman terhadap psikologi perilaku ini memunculkan variabel lain yang dapat diamati yaitu stimulus. Stimulus dipercaya dapat mempengaruhi individu bertindak. Dalam situasi tertentu stimulus merupakan variabel yang menguatkan (*reinforcing variable*) dalam respon perilaku khusus.

"The behavioral psychologist argues, therefore, that the laws which relate stimuli to behavioral response determine that pattern of an organism's behavior. In other words, an organism learns behavior patterns through reinforcement"[10]

Dengan demikian, *reinforcing* juga memunculkan respon dari individu terhadap sesuatu yang disebut sikap. Sikap disini merupakan konstruksi teoritis. Sebab sikap tidak mengacu pada 'sesuatu' yang tampak di dunia nyata. Sikap adalah sesuatu yang abstrak dan hanya ada dalam pikiran (*mindset*). Konsep sikap dimasukan ke dalam teori-teori perilaku sebab ia berguna untuk menjelaskan perilaku manusia.[11]

Lain halnya dengan Huntington yang melihat budaya politik suatu masyarakat, yakni terdiri dari sistem kepercayaan (*beliefs*) yang empiris mengenai simbol politik, nilai-nilai politik dan orientasi lain yang dapat dinyatakan secara ekspresif dari

[9] Afan Gaffar, Op.Cit, h.99. Periksa juga difinisi operasional yang dibuat oleh Albert Widjaja mengenai budaya politik yang merupakan salah satu variabel penelitian disertasinya yang menyebutkan bahwa budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuannya ini dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Selanjutnya baca Albert Widjaja, ***Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi***. Jakarta : LP3ES, 1988 h.250-255

[10] Lihat Dean Jaros and Lawrence V. Grant, ***Political Behavior***, (St. Martin's Press, 1974) p.245-71

[11] *Ibid*

masyarakat terhadap objek-objek politik.[12] Dari hasil kajian beberapa ahli yang dikutip Huntington bahwa budaya politik dan struktur politik adalah sesuatu yang sebangun (kongruen). Ada kesesuaian antara peran dan struktur politik di satu sisi, dengan pemusatan nilai-nilai politik dalam sistem di sisi lain. Dari nilai-nilai inilah, pada akhirnya akan membentuk orientasi individu terhadap sistem politik.

Logikanya tidal sampai disitu saja. Ada pola resiprokal antara nilai individu dengan sistem politik. Sangat jelas pada tahapan hubungan yang lebih jauh, keduanya saling mempengaruhi. Sistem politik menjadi determinan dalam pembentukan orientasi individu. Tapi sangat sulit untuk diuraikan, apakah sistem politik suatu negara modern secara otomatis mampu membentuk orientasi yang modern pula dari masyarakatnya? Kita dapat melihat, bagaimana proses pembentukan orientasi politik yang ada pada masyarakat terasing seperti Suku Asmat-Papua, Suku Kubu-Jambi atau Suku sakai-Riau terhadap sistem politik negara bangsa yang modern seperti Indonesia.

Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan memperhatikan nilai-nilai politik apa yang mereka pahami dan apa yang tidak dapat dipahami. Secara teori, budaya politik meliputi orientasi kognitif, afektif dan partisipatif. *Pertama*, orientasi Kognitif biasanya hanya berupa pemahaman terbatas terhadap simbol-simbol, dan tanda lambang. Pemahaman ini sebatas pemahaman terhadap lambang negara, simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Menurut Almond dan Verba, fenomena inilah yang membentuk budaya politik parokial dalam masyarakat.

Kedua, orientasi afektif sedikit lebih maju dari orientasi kognitif. Disamping adanya pemahaman, ia juga melibatkan unsur emosionalitas terhadap unsur-unsur dan simbol-simbol negara. Orientasi ini membentuk budaya politik subjektif. Dan, *ketiga*, orientasi partisipatif telah melibatkan pemahaman yang tinggi disertai dengan pertimbangan yang rasional di samping emosi yang sangat dalam. Bentuk inilah yang ideal dalam interaksi individu dengan sistem politik yang modern.

Pada masyarakat tradisional, mereka hanya mengenal

[12] Samuel P. Huntington and Jorge I. Dominquez, "*Political Development*" Dalam Fred I. Grenstein and Nelson W. Polsby (eds), ***Handbook of Political Science : Macropolitical Theory*** Vol 3, Addison-wesley Publishing company, 1975

simbol-simbol politik dan lambang-lambang negara dalam suatu proses interaksi politik. Umumnya simbol-simbol dan lambang-lambang ini menjadi alat komunikasi politik negara yang cukup efektif. Dalam hal ini, biasanya aparatur negara mengkonversikan nilai-nilai politik ke dalam simbol-simbol dan lambang-lambang kepada mereka. Proses gradual dari aktifitas ini meningkatkan pemahaman mereka yang pada akhirnya mempengaruhi predisposisi politik.

Yang menarik, individu berkecenderungan menjadi aktor politik. Ia dapat menetukan bagaimana besikap terhadap suatu kebijakan atau bagaimana ia terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, individu akan selalu berorientasi pada lingkungan yang ada disekitar individu.[13] Respon politik yang diberikan individu sangat bergantung bagaimana ia mempersepsikan lingkungan tersebut.

Tatanan nilai budaya suatu masyarakat dapat mempersepsikan seperti apa lingkungan (*environment*) yang ada disekitar mereka. Individu, dalam hal ini ia sebagai aktor politik, ketika mencoba memahami lingkungannya, akan mempolakan hubungan yang resiprokal guna kelangsungan hidupnya. Tentunya, pola hubungan ini akan membentuk hubungan yang positif (progresif), seperti adanya harmonisasi, dan bisa juga negatif (retrogresif) seperti munculnya konflik.

Lingkungan, cepat atau lambat terus mempengaruhi tatanan nilai masyarakat. Begitu juga sebaliknya, tatanan nilai masyarakat akan berusaha 'merekayasa' seperti apa lingkungan yang diinginkan individu. Dari kenyatan ini sangat tidak mungkin untuk menentukan budaya politik masyarakat Indonesia secara definitif. Ada beberapa alasan, pertama, jika kita mendasari pemahaman mengenai budaya politik sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Almond dan Verba (1963), maka masyarakat Indonesia akan terbagi ke dalam kelompok-kelompok budaya politik. Pengelompokan terbesar adalah pada budaya politik parokial-subjektif. Karena faktanya, konsentrasi masyarakat Indonesia terbanyak berada di daerah pedesaan. Sebagaimana diketahui daerah pedesaan sedikit sekali memperoleh informasi politik (*political efficacy*) dan ini

[13] Fred I. Greenstein, "Personality And Politics", Dalam Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby (eds), *Handbook of Political Science* : Micropolitical Theory Vol.2, Addison-Wesley Publishing Company, 1975

mempengaruhi pembentukan budaya politik masyarakat.

Pemahaman terhadap politik juga mensyaratkan adanya latar belakang pendidikan yang memadai. Ketidakmerataan fasilitas pendidikan yang dikecap masyarakat antara yang hidup di desa dan di kota membuat ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Pendidikan merupakan variabel determinan dalam pembentukan budaya politik suatu bangsa. Sebagaimana Almond dan Verba menggambarkan bahwa budaya politik yang partisipatif sangat mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang lebih rasional, sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, dan pendidikan yang memadai.

Menurut Max Weber[14] rasionalitas ini mengacu pada perhitungan yang masuk akal mencapai sasaran-sasaran berdasarkan pilihan-pilihan yang masuk akal dan dengan sarana-sarana yang efisien dan mengacu pada perumusan nilai-nilai tertinggi yang mengarahkan tindakan dan orientasi-orientasi yang terencana secara konsisten dan pencapaian nilai-nilai tersebut.

Kedua, tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dominan dibentuk atas dasar nilai-nilai agama dan adat istiadat. Keberagaman nilai agama dan adat istiadat yang hampir mencapai 400-an suku bangsa, bahasa dan ras, berakibat pada munculnya interpretasi yang berbeda dalam memahami fenomena sosial politik. Pada akhirnya akan menyebabkan polarisasi nilai yang bermuara pada pembentukan sikap dan orientasi politik yang berlainan.

Memang *trend* ini dinilai sebagai sesuatu yang alamiah. Namun, jika sikapdan orientasi politik ini tidak didasarkan atas saling pengertian dan toleransi, maka konflik pun tidak akan terhindarkan.

Ketiga, kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang sulit dibendung adalah sebuah keniscayaan dalam dialektika sejarah umat manusia. Nilai-nilai yang dibawa teknologi informasi berada di persekitaran masyarakat lokal, sedikit banyaknya mengecilkan semangat kebersamaan. Nasionalisme tergantikan oleh ego kesukuan (etnonasionalisme).

Ironinya, kemajuan teknologi ini ternyata semakin menegaskan adanya perbedaan

[14] F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta : Kanisius, 1993 h.74-75

yang mendasar suatu komunitas dengan komunitas lain.

Reposisi Budaya Politik Lokal

Tentu budaya politik yang dimaksud adalah dalam konteks keindonesiaan. Artinya, masyarakat lokal yang memiliki nilai-nilai budaya politik yang berbeda-heda harus dianggap sebagai tonggak-tonggak besar guna menopang budaya politik nasional. Budaya politik nasional jelas berasal dari tatanan nilai budaya lokal yang hidup berkembang dalam skala yang lebih luas yaitu keindonesiaan. Nilai-nilai budaya politik nasional itu hadir beriringan dengan nilai-nilai budaya politik lokal dan tidak saling meniadakan. Dengan demikian, nilai budaya politik nasional tidak akan memarginalkan nilai budaya politik lokal, walaupun terjadi proses asimilasi dimana nilai budaya politik nasional menjadi pemersatu pluralisme nilai masyarakat.

Ada kecenderungan formalisasi nilai budaya politik nasional yang dilakukan negara. Identitas pemersatu yang terdiri dari akumulasi nilai budaya politik lokal kadangkala tidak proposional. Ini terlihat pada munculnya nilai-nilai budaya politik nasional yang harus sama dengan nilai budaya politik yang dianut oleh elite yang berkuasa. Akibatnya nilai budaya lokal yang lain menjadi marginal di pentas nasional. Ironi sekali, dalam keberagaman nilai budaya bangsa yang ingin disatukan oleh negara menghadapi sebuah kenyataan yaitu konflik nilai dalam masyarakat.

Kita mahfum bahwa keberagaman Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Dan konflik nilai yang menyertai keberagaman yang ada kalanya harus melahirkan kekerasan politik (*political violence*) Kita tidak dapat menghindari konflik dalam masyarakat yang plural ini. Yang dapat dilakukan hanya meng-eliminasinya hingga tingkatan tertentu. Konflik ini muncul bermula dari benturan akal budi dengan hawa nafsu yang inheren dengan perilaku hidup masyarakat.

Dominasi hawa nafsu dalam diri individu terhadap akal budi memunculkan kejahatan antar etnis, kejahatan bernuansa agama, dan pengagungan suatu ras.

Adalah suatu kewajaran jika budaya politik nasional tetap dipertahankan sebagai identitas bersama tanpa mengecilkan arti budaya politik lokal. Untuk itulah perlu dipikirkan kembali bagaimana memposisikan kedua budaya tersebut sehungga terhindar dari konflik kepentingan (*conflict of*

interest). Salah satu alternatif yang dapat dijadikan preferensi dalam memposisikan kedua budaya tersebut adalah dengan menyediakan wadah pertemuan (*melting pot*) yang mampu mengakomodasikan kepentingan kedua budaya tersebut.

Dalam proses ideologisasi dalam masyarakat, seyogyanya negara menyadari kondisi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tidak hanya nilai-nilai yang berlaku dalam skal global, nilai-nilai lokal pun harus diakomodasi oleh negara guna membangun semangat nasionalisme. Negara yang bersandar pada nilai-nilai masyarakat akan tetap eksis mencapai tujuannya.

CATATAN PENUTUP

Uraian yang telah dikemukan di atas merupakan deskripsi singkat munculnya benturan nilai budaya politik dalam konteks keindonesia. Benturan tersebut seringkali memunculkan konflik politik. Konflik politik dalam konteks ini, terjadi karena budaya politik nasional yang direpresentasikan elite mengecilkan arti nilai-nilai politik lokal. Padahal keduanya saling mempengaruhi. Artinya, konflik yang berlangsung dalam masyarakat juga merupakan akibat terjadinya pergeseran nilai dalam budaya politik lokal yang didominasi oleh negara.

Negara yang di representasikan oleh sebagian kecil individu yang memegang kekuasaan (*political power*) berkecendrungan memaksakan nilai lain (formalisme nilai) pada masyarakat yang plural. Secara sederhana kita dapat memahami bahwa ancaman disintegrasi yang terjadi sebenarnya bermula dari benturan nilai budaya politik. Benturan ini ditandai dengan tidak adanya kesesuaian dan saling pengertian dari elite. Dan yang tragisnya muncul pemaknaan yang sempit terhadap hakikat "keindonesiaan" dari elite-elite yang berkuasa.***